



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI BIDANG : INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN,
INVESTASI, STANDARDISASI, BP BATAM, DAN BPKS SABANG**

- Tahun Sidang : 2014-2015
Masa Persidangan : II
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Rapat ke : 5 (lima)
Hari/Tanggal : Senin, 19 Januari 2015
W a k t u : Pukul 10.00 s.d 17.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat : Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/ F-FPAN)
didampingi :
1. Dodi Reza Alex Noerdin (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG)
2. Heri Gunawan (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/F-PGERINDRA)
3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wk. Ketua Komisi VI DPR RI/
F-PD)
- Sekretaris Rapat : Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a :
1. Pengantar Ketua Rapat
2. Perkenalan
3. Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2014
4. Rencana Program Kerja Anggaran Belanja Tambahan (ABT) tahun 2015 Kementerian BUMN dan Rencana Program Kerja tahun 2015 Kementerian BUMN (termasuk masalah PLN dan Telkomvision);
5. Membahas masalah Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015
6. Berkaitan dengan Visi dan Misj Presiden untuk peningkatan kinerja Kementerian BUMN Periode 2014-2015;
7. Bagaimana Road Map Kementerian BUMN untuk Periode 2014-2019.
- Hadir :
A. 47 dari 48 Anggota Komisi VI DPR RI.
B. Menteri BUMN didampingi para Dirut BUMN beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI beserta jajaran dibuka pada pukul 10.00 WIB, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat mempersilakan Menteri BUMN RI untuk menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pertanyaan tertulis Komisi VI DPR RI.

- c. MENTERI BUMN menyampaikan surat Nomor : S-23/MBU/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Usulan Revisi Target Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dalam RAPBN-P TA 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI yang intinya mengusulkan perubahan target bagian Pemerintah atas Laba BUMN dalam RAPBN-P TA 2015 dari Rp44.000,0 miliar menjadi sebesar Rp34.956,5 miliar, dengan rincian sebagai berikut :

NO	Perusahaan	Target APBN 2015	Usulan APBN-P 2015
1	BUMN Non Tbk	21.470.000.000.000	17.822.089.000.000
2	BUMN Tbk	21.360.000.000.000	16.043.000.000.000
3	Minoritas	1.170.000.000.000	1.091.361.000.000
Jumlah		44.000.000.000.000	34.956.450.000.000

Kementerian BUMN mengharapkan dukungan Komisi VI DPR RI selaku mitra kerja Kementerian BUMN atas usulan perubahan target dividen BUMN TA 2015 sebagaimana tersebut di atas.

- D. Berkenaan dengan usulan perubahan anggaran tambahan PMN pada BUMN dan setoran dividen BUMN, dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut didasari atas **perubahan paradigma**, yaitu:

- 1) Peran BUMN dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional yang semula lebih difokuskan pada sisi penerimaan pendapatan negara (dividen & pajak), ke depan juga akan dioptimalkan perannya sebagai agen pembangunan.
- 2) Belanja modal APBN yang terkait dengan kegiatan usaha BUMN, sejauh mungkin dapat dikelola langsung oleh BUMN bersangkutan. Pertimbangannya adalah apabila dana tersebut diserahkan kepada BUMN dalam bentuk tambahan PMN, maka **BUMN dapat melakukan leverage** sehingga **kegiatan investasi yang dilakukan oleh BUMN dapat lebih besar daripada dana PMN tersebut**. Secara tidak langsung, *multiplier effect* kepada perekonomian juga akan lebih besar. Selain itu, pengalihan belanja modal dari APBN Kementerian Teknis langsung kepada BUMN akan lebih tepat sasaran mengingat BUMN lebih memahami kebutuhan belanjanya, di samping mempermudah dari aspek administrasi.
- 3) Sejalan dengan hal tersebut, pengurangan setoran dividen juga akan memperkuat posisi permodalan BUMN yang bersangkutan, sehingga keuangannya makin sehat dan pengembangan perusahaan dapat lebih ditingkatkan.

E. Penjelasan tentang usul perubahan target setoran dividen BUMN

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, target setoran dividen pada RAPBN-P 2015 mengalami perubahan yaitu semula **Rp44,00 triliun (APBN 2015)** diusulkan turun menjadi **Rp34,95 triliun** sesuai dengan surat kami No. **S-23/MBU/01/2015 tanggal 12 Januari 2015**. Pertimbangan kami untuk mengusulkan penurunan target dividen dilatarbelakangi oleh keinginan kami mendorong agar BUMN berperan aktif dalam mewujudkan program-program prioritas Pemerintah, khususnya dalam bidang kedaulatan energi, kemandirian pangan, serta pembangunan infrastruktur dan kemaritiman. Dengan penurunan setoran dividen tersebut, BUMN-BUMN terkait dapat memanfaatkan dana bagian laba yang tidak dibagikan (*retained earnings*) tersebut untuk melakukan investasi dan berbagai kegiatan yang terkait dengan program-program prioritas Pemerintah. Bahkan dengan *retained earnings* tersebut, BUMN yang bersangkutan dapat

3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR-RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan Menteri BUMN RI.

II. POKOK POKOK PEMBICARAAN

1. PENJELASAN MENTERI BUMN

- A. Realisasi anggaran Kementerian BUMN tahun 2014 sebesar **78,9%** atau **Rp97,4 miliar** dari pagu sebesar **Rp123,5 miliar**, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi terkait kebijakan penghematan anggaran.
 - 1) Anggaran Kementerian BUMN untuk tahun anggaran 2015 sebesar **Rp133,81 miliar** sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015. Namun demikian anggaran tersebut belum termasuk anggaran tunjangan kinerja tahun 2015 yang saat ini dianggarkan pada Bagian Anggaran 0999 (Kementerian Keuangan) sebesar **Rp21,76 miliar**, yang pada APBN-P 2015 akan dialihkan menjadi anggaran Kementerian BUMN. Selain itu, pada APBN-P 2015 juga akan dilakukan revisi anggaran dalam rangka penghematan anggaran perjalanan dinas/rapat konsinyering sebesar **Rp11,24 miliar** yang akan dialokasikan untuk penajaman tupoksi dan pencapaian output masing-masing unit, peningkatan sarana prasarana perkantoran dan sistem informasi.
 - 2) Terkait dengan tugas Kementerian BUMN dalam rangka pembinaan BUMN, terdapat beberapa perubahan yang menyangkut tambahan PMN kepada BUMN dan perubahan target setoran dividen BUMN yang kami mohonkan persetujuan dari Komisi VI DPR RI sebagai rekomendasi kepada Badan Anggaran DPR RI.
 - 3) Sebagaimana surat kami kepada Komisi VI DPR RI Nomor : **S-22/MBU/01/2015 tanggal 12 Januari 2015**, jumlah tambahan PMN kepada BUMN yang diusulkan dalam RAPBN-P 2015 adalah sebesar **Rp48,01 triliun** yang terdiri dari **PMN tunai sebesar Rp46,80 triliun** dan **PMN non tunai sebesar Rp1,21 triliun**. Jumlah tersebut adalah di luar tambahan PMN kepada PT PAL sebesar **Rp1,5 triliun** yang telah ditetapkan dalam UU APBN 2015, serta tambahan PMN untuk BUMN yang berada dibawah pembinaan langsung Kementerian Keuangan.
- B. Menteri BUMN menyampaikan surat Nomor S-22/MBU/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 ditujukan kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI perihal : usulan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN dalam RAPBN-P TA.2015. Telah ditetapkan tambahan PMN pada PT.PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp1.500 Miliar. Pemerintah memerlukan dukungan berupa tambahan PMN untuk melakukan investasi dan sekaligus memperkuat permodalan tambahan PMN pada BUMN yang dimasukkan dalam RAPBN-P TA 2015 sebesar Rp48.06 miliar, yang terdiri dari :

NO	BUMN	Nilai PMN (Rp Miliar)
1	PT Angkasa Pura II (Persero)	3.000.000.000.000
2	PT. ASDP (Persero)	1.000.000.000.000
3	PT. PELNI (Persero)	500.000.000.000
4	PT. Djakarta Lloyd (Persero)	350.000.000.000
5	PT. Utama Karya (Persero)	3.600.000.000.000
6	Perum Perumnas	2.000.000.000.000

7	PT. Waskita Karya (Persero) Tbk	3.500.000.000.000
8	PT. Adhi Karya (Persero)	1.400.000.000.000
9	PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)	3.150.000.000.000
10	PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)	17.500.000.000
11	PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero)	100.000.000.000
12	PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)	97.500.000.000
13	PT. Perkebunan Nusantara XI (Persero)	65.000.000.000
14	PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero)	70.000.000.000
15	PT. PNM (Persero)	1.000.000.000.000
16	PT. Garam (Persero)	300.000.000.000
17	PT. RNI (Persero)	280.000.000.000
18	Perum BULOG	3.000.000.000.000
19	PT. Pertani (Persero)	470.000.000.000
20	PT. SHS (Persero)	400.000.000.000
21	PT. Perikanan Nusantara (Persero)	200.000.000.000
22	Perum Perikanan Nusantara	300.000.000.000
23	PT. Dirgantara Indonesia (Persero)	400.000.000.000
24	PT. Dok Perkapalan Surabaya (Persero)	200.000.000.000
25	PT. Dok Kodja Bahari (Persero)	900.000.000.000
26	PT. IKI (Persero)	200.000.000.000
27	PT. ANTAM (Persero) Tbk	7.000.000.000.000
28	PT. PINDAD (Persero)	700.000.000.000
29	PT. KAI (Persero)	2.750.000.000.000
30	PT.PPA (Persero)	2.000.000.000.000
31	PT.Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	250.000.000.000
32	PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.600.000.000.000
33	PT.Pelindo IV (Persero)	2.000.000.000.000
34	PT Krakatau Steel (Persero) *	956.000.000.000
35	PT. Bahan PUI (Persero) **	250.000.000.000
TOTAL		48.006.000.000.000

*) Tambahan PMN untuk PT. Krakatau Steel (Persero) sebesar **Rp956.493.260.000** merupakan tambahan PMN *non cash* yang berasal dari kapitalisasi laba tahun berjalan (periode Januari – Juni 2010) sebelum dilaksanakannya IPO pada tahun 2010.

***) Tambahan PMN untuk PT. Bahana PUI (Persero) sebesar Rp250 Miliar merupakan tambahan PMN *non cash* yang berasal dari konversi hutang pook RDI/SLA yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan berdasarkan surat Nomor : S-792/MK.05/2012 tanggal 5 November 2012.

melakukan *leverage* pendanaan. *Dividend payout ratio* yang digunakan dalam pengusulan target setoran dividen sekitar **Rp34,95 triliun** tersebut berkisar antara **5% - 40%**. Sementara itu, jumlah BUMN yang diperkirakan dapat memberikan kontribusi setoran dividen sebanyak **66 BUMN**, termasuk PT Krakatau Steel yang sebetulnya dividennya berasal dari laba tahun buku 2010 yang sudah dikonversi menjadi ekuitas pada saat BUMN tersebut melakukan IPO pada tahun 2010. Setoran dividen dari **perusahaan minoritas** berasal dari **12 BUMN** dengan jumlah total sekitar **Rp1,1 triliun**.

- F. Berikutnya akan kami sampaikan penjelasan tentang kesiapan BUMN dalam menghadapi pemberlakuan **Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**. Sebagaimana dimaklumi, MEA yang akan diberlakukan pada akhir tahun 2015 ini mengandung konsekuensi semakin hilangnya batas negara ASEAN khususnya dalam aspek perdagangan antar negara. Produk-produk yang akan dihasilkan oleh suatu negara lebih leluasa masuk ke negara lain, atau sebaliknya.

Faktor kekuatan **daya saing** akan menjadi kunci apakah produk-produk yang dihasilkan di dalam negeri masih mampu menguasai pasar dalam negeri, atau sebaliknya pasar dalam negeri akan kebanjiran produk-produk yang dihasilkan negara lain. Hal ini akan menjadi ancaman yang serius bagi pelaku usaha di dalam negeri, termasuk BUMN. Kementerian BUMN sangat menyadari tingginya risiko terkait dengan pemberlakuan MEA, khususnya menyangkut ancaman semakin meningkatnya persaingan yang harus dihadapi oleh BUMN. Untuk itu, tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan selain **meningkatkan daya saing seluruh BUMN**, terutama BUMN yang dihadapkan dengan persaingan *head-to-head* dengan pelaku usaha dari negara-negara lain di ASEAN.

Di samping itu MEA dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pasar dalam negeri, dan terbuka peluang bagi BUMN untuk meningkatkan pasar di wilayah ASEAN. Sebagai contoh, saat ini BUMN sudah banyak yang memasuki pasar ASEAN seperti Antam, Timah, dan Wika di Myanmar, Pupuk Indonesia di Filipina, Telkom di Timor Leste dan Malaysia, Semen Indonesia di Vietnam.

- G. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan mengenai visi dan misi, program, serta Road Map Kementerian BUMN, perkenankan kami menyampaikan paparan singkat mengenai **optimalisasi peran BUMN untuk mendukung agenda prioritas Pemerintah dan memperkuat perekonomian nasional**.

- ✓ Sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden, sebagaimana kementerian/lembaga lainnya, Kementerian BUMN tidak membuat visi dan misi secara khusus, tetapi lebih kepada mendukung visi dan misi Presiden.
- ✓ Presiden dan kabinet kerja telah mencanangkan program **NAWA CITA** yang intinya adalah bagaimana mengupayakan perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui **9 (sembilan) program prioritas**.
- ✓ Kementerian BUMN diharapkan dapat berperan dalam rangka mendukung suksesnya program prioritas tersebut. Untuk itu, diperlukan perubahan paradigma baik menyangkut kebijakan Kementerian BUMN sendiri maupun bagaimana Kementerian BUMN mengoptimalkan peran BUMN yang difokuskan sebagai **agen pembangunan**.
- ✓ Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan Kementerian BUMN dalam melakukan pembinaan terhadap BUMN juga akan mengalami perubahan. Selain dituntut lebih efisien, BUMN juga dituntut meningkatkan perannya antara lain menyangkut investasi (*capex*), kualitas pelayanan publik, penyerapan tenaga kerja, dan *multiplier-effect* lainnya yang memberikan manfaat terhadap masyarakat luas.

- ✓ Sejalan dengan program **NAWA CITA**, BUMN diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan program-program prioritas yang berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan **agenda 1**, yaitu **menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara**", BUMN dapat berperan dalam mendukung untuk mewujudkan **kedaulatan maritim dan mengembangkan industri pertahanan nasional**.
- ✓ Terkait **agenda 6**, yaitu **meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya**, BUMN dapat berperan dalam mendukung untuk mewujudkan **pembangunan infrastruktur** meliputi jalan, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri.
- ✓ Di samping itu, terkait **agenda 7**, yaitu **mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik**, BUMN dapat berperan dalam mendukung mewujudkan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi.
- ✓ BUMN diharapkan dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan kedaulatan maritim dan pembangunan infrastruktur.

a. Pembangunan Tol Laut

- Salah satu penyebab lemahnya daya saing produk nasional adalah disebabkan oleh tingginya biaya logistik nasional (sekitar **25%** dari PDB) dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara ASEAN (misalnya, Singapura 8%, Malaysia 13%).
- Efisiensi biaya logistik menjadi sangat penting mengingat NKRI adalah negara berbentuk kepulauan (sekitar 17.000 pulau), sehingga konektivitas dengan moda transportasi laut menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan pemerataan hasil pembangunannya.
- Untuk pembangunan tol laut diperkirakan akan dibutuhkan sekitar **24 pelabuhan** dalam (*deep seaport*) dan pelabuhan-pelabuhan feeder lainnya, baik menyangkut prasarana (dermaga, terminal, dan alur) dan sarana (suprastruktur berupa peralatan bongkar muat, dan fasilitas lainnya). BUMN pelabuhan yang terdiri dari **PT Pelindo I s.d. IV**, didorong untuk makin meningkatkan perannya dalam pembangunan dengan lebih agresif melaksanakan investasi untuk mewujudkan sarana dan prasarana tersebut. Kedepan juga akan diterapkan **sistem *berthing window*** yaitu pengaturan jadwal kapal dan integrasi sistem yang sama untuk seluruh Pelindo. Bahkan untuk **PT Pelindo IV (Persero)** yang mengelola beberapa pelabuhan di **wilayah Indonesia Timur** yang secara komersial belum dapat memberikan keuntungan finansial direncanakan untuk mendapat **tambahan PMN**.
- Selain itu, untuk mendukung **program konektivitas**, **PT Pelni (Persero)**, **PT Djakarta Lloyd (Persero)**, dan **PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)**, diharapkan dapat berperan melaksanakan investasi terkait dengan penyediaan alat angkut berupa kapal penumpang dan kapal barang, dan perbaikan serta pengembangan *ferry terminal*. Dalam rangka **perbaikan kualitas pelayanan kepada penumpang angkutan laut**, PT Pelindo I – IV dan **PT ASDP (Persero)** juga akan melakukan perbaikan dan modernisasi terminal penumpang yang selama ini terkesan kumuh.

Dengan demikian, kedepan diharapkan terminal penumpang angkutan laut akan lebih tertib, steril, serta lebih menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan laut. Dana tambahan PMN yang akan diberikan kepada **PT Pelni (Persero)** dimaksudkan untuk investasi pengadaan sarana (kapal) angkutan barang guna melayani rute ke daerah-daerah yang mungkin tidak menguntungkan secara

komersial namun sangat penting menjaga stabilitas ekonomi dan politik daerah tersebut (antara lain daerah terpencil seperti Kijang, Tobelo, Serui, Reo, dan Tual).

- Pembangunan dan **peningkatan kapasitas galangan** juga diperlukan dalam rangka mendukung suksesnya program tol laut. Untuk itu BUMN galangan kapal yang terdiri dari **PT PAL (Persero)**, **PT Dok Kodja Bahari (Persero)**, **PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero)**, dan **PT Industri Kapal Indonesia (Persero)** diharapkan dapat meningkatkan pembangunan kapal maupun pemeliharaan dan perbaikan kapal dalam rangka meningkatkan keandalan armada angkutan laut. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan dukungan tambahan PMN kepada BUMN galangan, dalam rangka meningkatkan fasilitas dan kualitas produksi.

b. Konektivitas Darat

- Dalam rangka pemerataan pembangunan ekonomi, khususnya di luar pulau Jawa, secara bertahap konektivitas darat akan ditingkatkan, baik dengan penambahan ruas jalan tol maupun pengembangan jalur kereta api. Melalui Perpres No. 100 Tahun 2014, Pemerintah telah menugaskan **PT Hutama Karya (Persero)** untuk mewujudkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Mengingat keekonomian dari proyek jalan tol Trans Sumatera belum layak, maka **PT Hutama Karya (Persero)** diusulkan untuk mendapatkan tambahan PMN.
- Selain jalan tol, peningkatan konektivitas darat juga dilakukan dengan pengembangan jalur kereta api Trans Sumatera. Sesuai ketentuan perundangan, jalur kereta api Trans Sumatera akan dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Sementara itu, PT Kereta Api diharapkan menyediakan kebutuhan **rolling stock** (lokomotif, kereta penumpang, kereta barang, dan sarana lainnya) untuk pengoperasian jalur tersebut. Untuk tahun 2015 diharapkan PT Kereta Api akan diberikan tambahan PMN.

c. Konektivitas Udara

- Dalam rangka meningkatkan konektivitas udara, Pemerintah berencana akan membangun 10 bandara baru dalam 5 tahun mendatang. Selain itu, kapasitas bandara Soekarno-Hatta yang merupakan pintu gerbang internasional dan mencerminkan wajah Indonesia perlu dilakukan peningkatan, mengingat pada saat ini sudah *overcapacity*. Untuk itu diperlukan **pembangunan runway ketiga**, dalam hal tersebut kebutuhan dana untuk pembebasan lahan, sehingga **PT Angkasa Pura II (Persero)** diusulkan diberikan tambahan PMN.

d. Industri Strategis

BUMN sektor industri strategis juga didorong untuk memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan tambahan PMN untuk **PT Pindad (Persero)** dan **PT Dirgantara Indonesia (Persero)**.

✓ BUMN diharapkan dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan **Ketahanan Pangan**.

- a). Ketahanan pangan juga menjadi program prioritas Pemerintah, mengingat hal tersebut menyangkut kesejahteraan petani dan kebutuhan masyarakat luas. **Perum Bulog** diharapkan dapat berperan lebih besar dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok untuk masyarakat luas dan menjamin harga beli produk pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk itu perannya tersebut, untuk **Perum Bulog** diusulkan mendapatkan tambahan PMN.
- b). BUMN lain yang juga diharapkan berperan dalam ketahanan pangan adalah PTPN khususnya yang memproduksi **gula berbasis tebu**. Dalam rangka menuju

swasembada gula berbasis tebu, PTPN perlu melakukan perbaikan produktivitas kebun tebu (*on farm*) dan efisiensi pabrik gula (*off farm*). Perbaikan *on farm* dan *off farm* tersebut akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani. Untuk itu, diusulkan tambahan PMN kepada PTPN produsen gula.

- c). **PT Sang Hyang Seri (Persero)** dan **PT Pertani (Persero)** juga diusulkan mendapatkan tambahan PMN guna mendukung program penyediaan benih unggul bagi para petani. Sementara itu, **PT Perikanan Nusantara (Persero)** dan **Perum Perikanan Indonesia** diusulkan mendapatkan tambahan PMN untuk tambahan modal kerja dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran ikan, mempercepat pengembangan industri perikanan terpadu, dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan.

✓ Beberapa BUMN Tbk diharapkan ikut mendukung program prioritas Pemerintah dan untuk itu perlu adanya peningkatan kemampuan pendanaan melalui penerbitan saham baru (*right issue*). Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyediakan tambahan PMN guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham pada BUMN Tbk tersebut. BUMN-BUMN Tbk yang akan melakukan penerbitan saham baru yaitu:

- a). **PT Waskita Karya (Persero) Tbk**, dalam rangka mendukung penyelesaian jalan tol strategis yang terbengkalai dan pembangunan jalan tol baru, serta transmisi 500 KV wilayah Sumatera.
- b). **PT Adhi Karya (Persero) Tbk**, dalam rangka mendukung pembangunan monorel dan stasiun pendukung untuk mengurangi beban kemacetan jalan tol menuju Jakarta.
- c). **PT Aneka Tambang (Persero) Tbk**, dalam rangka mendukung pembangunan proyek smelter dan pengolahan hasil tambang sesuai kebijakan Pemerintah.
- d). **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**, untuk memperkuat kapasitas modal dalam rangka mendukung peningkatan pembiayaan pembangunan infrastruktur nasional.

✓ Jumlah penerima tambahan PMN yang diusulkan dalam RAPBN-P 2015 dengan jumlah total sebesar **Rp48,006 triliun** adalah sebanyak **35 BUMN**, sebagaimana bahan yang telah disampaikan dan Apabila diperkenan nanti pada saatnya masing-masing Direksi perusahaan tersebut dapat diminta untuk menyampaikan paparan tentang PMN yang diusulkan.

Sedangkan secara detail mengenai Roadmap Kementerian BUMN 5 tahun kedepan masih dalam proses penyusunan karena RPJMN 2015-2019 baru ditetapkan Presiden pada awal Januari 2015 yang lalu, dan Kementerian/Lembaga diberikan menyelesaikan Road Map dalam waktu **2 bulan kedepan**.

H. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan proyeksi kinerja BUMN Tahun Buku 2014 sebagai berikut:

- 1) Total aset pada akhir tahun diproyeksikan sebesar **Rp4.467 triliun**, **naik 5,95%** dibandingkan posisi aset pada akhir tahun 2013 yang sebesar **Rp4.216 triliun** dengan CAGR 5 tahun terakhir sebesar **15,56%**.
- 2) Total pendapatan tahun 2014 diproyeksikan sebesar **Rp1.912 triliun**, **naik 6,70%** dibandingkan tahun 2013 sebesar **Rp1.792 triliun** dengan CAGR 5 tahun terakhir sebesar **13,90%**.
- 3) Laba bersih tahun 2014 diproyeksikan sekitar **Rp154 triliun** (belum dikurangi dengan BUMN yang rugi), **naik 1,32%** dibandingkan tahun 2013 yang sebesar **Rp152 triliun** dengan CAGR 5 tahun terakhir sebesar **10,58%**.

- 4) Total **belanja modal** pada tahun 2014 diproyeksikan sekitar **Rp255** triliun, naik 20,28% dibandingkan tahun 2013 sekitar Rp212 triliun dan CAGR 5 tahun terakhir sebesar 28,68%.
- 5) Jumlah BUMN rugi tahun 2014 diperkirakan sebanyak **20 BUMN**, dengan perkiraan total kerugian sebesar **Rp7,09 triliun**. Capaian ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu BUMN yang rugi sebanyak **27 BUMN** dengan total kerugian sebesar **Rp34,58 triliun**.

Dapat kami informasikan bahwa jumlah BUMN tahun 2014 mengalami perubahan yaitu menjadi **119 BUMN**, berkurang 20 perusahaan dikarenakan **2 BUMN; PT Askes (Persero)** dan **PT Jamsostek (Persero)** berubah status menjadi BPJS, **14 BUMN** Perkebunan menjadi **1 BUMN Holding**, dan **6 BUMN Kehutanan** menjadi 1 BUMN Holding.

- I. Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan mengenai PSO dapat kami sampaikan bahwa jumlah BUMN yang akan menerima PSO tahun 2015 sebanyak 10 BUMN. Dari 10 BUMN tersebut yang akan diusulkan untuk menerima PMN adalah **PT Peln (Persero)**, **Perum Bulog**, **PT SHS (Persero)**, dan **PT KAI (Persero)**.
- J. Berkaitan dengan kebijakan aset dapat kami sampaikan bahwa aset BUMN harus dipergunakan seoptimal mungkin untuk operasional perusahaan dan peningkatan daya saing BUMN. Terkait dengan aset yang *idle*, harus dioptimalkan melalui berbagai strategi terutama bekerjasama atau pelepasan kepada BUMN (meningkatkan sinergi antar BUMN). Kami sedang mengkaji peraturan dan kebijakan terkait dengan optimalisasi dan pelepasan aset BUMN bersama dengan beberapa pihak, untuk melakukan penyempurnaan kebijakan masalah asset dimaksud.
- K. Selanjutnya kami mengharapkan dukungan/persetujuan dari yang terhormat para Anggota Dewan, khususnya mengenai:
 - 1) Persetujuan **relokasi anggaran** tunjangan kinerja untuk Kementerian BUMN sebesar **Rp21.765.890.250** yang semula dianggarkan pada Bagian Anggaran 0999 (Kementerian Keuangan) dan **pengalihan alokasi anggaran** sebesar **Rp11.235.250.000** untuk penajaman tupoksi dan pencapaian output masing-masing unit, peningkatan sarana prasarana perkantoran dan sistem informasi.
 - 2) Persetujuan perubahan **target setoran dividen** dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2015 menjadi sebesar **Rp34,95 triliun**, dari semula sebesar **Rp44 triliun** yang ditetapkan dalam APBN Tahun 2015.
 - 3) Persetujuan **tambahan PMN** untuk **35 perusahaan** dengan total nilai sebesar **Rp48,006triliun**.

L. Penjelasan Tambahan Menteri BUMN

Menjawab mengenai isu rencana penjualan Aset Gedung Kementerian BUMN RI diselesaikan oleh Menteri BUMN bahwa untuk efisiensi dan efektifitas terhadap penggunaan gedung kantor tersebut akan ditawarkan untuk disewakan kepada pihak Kementerian atau Lembaga Negara/Pemerintah yang saat ini belum memiliki gedung karena saat ini Kantor Kementerian memiliki 22 Lantai sementara Karyawan Kementerian BUMN hanya sekitar 200 orang sehingga banyak lantai-lantai gedung yang kosong tidak dimanfaatkan.

III. KESIMPULAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI beserta jajaran **diskors** untuk dijadwalkan kembali dalam Raker berikutnya pada hari Selasa, tanggal 3 Februari 2015 dan meminta kepada Menteri BUMN memberikan jawaban tertulis secara detail dan komprehensif atas pertanyaan lisan Anggota Komisi VI DPR RI.

2. Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat dengan Para Direksi BUMN Penerima PMN pada tahun 2015 sebanyak 35 Perusahaan BUMN
3. Komisi VI DPR RI akan membentuk Panja BUMN (Panja Holding/PMN) yang selanjutnya akan dibahas dan diputuskan dalam Rapat Intern Komisi VI DPR RI.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.45 WIB